

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020



6  
PERCEPA  
CORONA

Covid-19 #Sai  
Tangan #Bul

MASS MEDIA

NEWS



DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG  
2021



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang No: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan Tugas Pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan selama tahun 2020. Melalui laporan ini, kami berusaha memberikan gambaran dan telaahan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan ke dalam perencanaan strategik sebelumnya.

Walaupun di dalam penyusunannya diusahakan secara optimal, namun laporan ini tetap saja mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran-saran dari pihak terkait sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Singaraja, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



**Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620608 198203 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Data Umum Organisasi .....	1
D. Isu Strategis Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng .....	5
B. Penetapan Kinerja .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	11
B. Realisasi Anggaran .....	21
BAB IV PENUTUP .....	23

## IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Setingkat Eselon II, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik
2. Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok tersebut diatas, ditetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu Meningkatnya pembangunan Buleleng di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
3. Dari tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak diwujudkan dalam pembangunan adalah: Meningkatnya e-government di Pemkab Buleleng, Meningkatnya pelayanan informasi publik, dan Meningkatnya pengamanan data dan informasi.
4. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai target pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2020.
5. Dari hasil pengurukuran IKU yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, dari 3 indikator tersebut, satu indikator tercapai 123,33%, sedangkan 2 indikator lainnya tercapai 100%. Sedangkan pada sisi keuangan, secara keseluruhan tercapai 89,47%.
6. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terdapat permasalahan yang prinsipil yang dapat menghambat atau mengganggu keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pada umumnya program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Walaupun tidak terdapat hal-hal yang prinsipil, namun terbitnya regulasi (Undang-undang) terbaru perlu menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan tidak menjadi masalah. Demikian pula dalam pemberian pelayanan informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan relevan dengan mempergunakan layanan Web Site <http://www.bulelengkab.go.id>; E-Mail: [kominfosandi@bulelengkab.go.id](mailto:kominfosandi@bulelengkab.go.id) dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara bertahap meningkatkan profesionalisme aparatur yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

### **C. Data Umum Organisasi**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, yang dalam dokumen ini selanjutnya disebut Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas ini merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng adalah Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, sedangkan fungsinya antara lain:

1. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

#### **D. Isu Strategis Organisasi**

Isu strategis yang saat ini dihadapi oleh Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng adalah:

##### **1. Rendahnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng.**

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*) maka dibutuhkan penerapan *electronic government* (e-gov) yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Buleleng. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov.

Saat ini, seluruh SKPD lingkup Pemkab Buleleng telah terhubung dalam jaringan online sistem, namun pemanfaatannya masih sangat kurang, sehingga komunikasi data antar SKPD belum dapat terlaksana dengan baik. Dilihat dari piranti lunaknya, sebagian besar SKPD juga telah memiliki aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk menunjang kinerja SKPD tersebut, baik yang dibuat sendiri bersama pihak ke-3 maupun yang didapatkan dari pemerintah pusat, namun aplikasi-aplikasi tersebut masih berdiri sendiri, belum bisa saling bertukar data atau menggunakan data bersama. Hal ini disebabkan karena perbedaan platform yang digunakan oleh masing-masing aplikasi sistem informasi tersebut. Selain itu juga, sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dibidang TIK masih sangat kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga pemanfaatan sumber daya TIK yang ada belum optimal.

Selain dari tiga aspek yang telah dijelaskan di atas (jaringan, aplikasi dan SDM), masalah regulasi juga menjadi penghambat dari implementasi e-government di Kabupaten Buleleng, karena hingga saat ini belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang implementasi e-Government di Kabupaten Buleleng. Regulasi yang ada saat ini masih berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang baru mengatur beberapa bagian saja dari pembangunan dan implementasi e-Government di Kabupaten Buleleng, belum secara keseluruhan.



Berbagai hal tersebut di atas ini lah yang menjadi tantangan bagi Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas untuk membangun dan mengembangkan e-Government di Kabupaten Buleleng.

## **2. Rendahnya penyebaran informasi publik ke masyarakat.**

Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sebagai lembaga publik, Pemerintah daerah wajib untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi, yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang undang Dasar 1945 pasal 28 F, dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Selain sebagai pemenuhan atas hak asasi manusia, penyebaran informasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan, sebab tanpa adanya penyebaran informasi ini, masyarakat tidak akan mengetahui proses pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga akan menghambat peran serta masyarakat dalam ikut melaksanakan pembangunan.

Luas wilayah, kondisi geografis, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat ini. Kehadiran berbagai media komunikasi saat ini, seperti media elektronik (radio), media cetak (surat kabar dan majalah), media tradisional (bondres), media interpersonal (ceramah, dialog, sosialisasi), media luar ruang (baliho, pamflet, leaflet) serta media internet (website, facebook, instagram), menjadi peluang bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng, dalam usahanya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya.

## **3. Rendahnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng.**

Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yg baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka statistik data dasar merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan statistik data sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dibutuhkan institusi yang akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sektoral tersebut. data hasil pengolahan inilah yang dapat digunakan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi memberikan kemajuan dan kemudahan bagi manusia, di sisi yang lain memberikan ancaman bagi manusia itu sendiri. Karena jika disalah gunakan kemajuan TIK ini akan dapat membahayakan dan merugikan manusia.

Keamanan data dan informasi milik Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan, karena akan dapat mengganggu sistem pemerintahan dan stabilitas keamanan daerah. Sistem keamanan data dan informasi inilah yang menjadi persoalan yang dihadapi saat ini, karena kemajuan teknologi menyebabkan orang semakin mudah untuk mendapatkan data dan informasi milik Pemerintah Daerah, sehingga dibutuhkan sistem dan teknologi yang terus mengikuti perkembangan TIK tersebut.

Selain data dan informasi yang harus dijaga keamanannya, maka orang-orang penting (*Very Very Important Person/ VVIP*), tempat-tempat strategis, maupun kegiatan-kegiatan penting milik Pemerintah Daerah juga harus dijaga keamanannya dari sisi TIK. Keamanan yang dimaksud disini adalah keamanan non fisik, seperti keamanan komunikasi data antar pimpinan daerah, pengamanan tempat maupun kegiatan menggunakan teknologi informasi, dan lain sebagainya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

##### 1. Visi dan Misi

Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng sebagai instansi milik Pemerintah Kabupaten Buleleng mendukung sepenuhnya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Buleleng. Visi Kepala Daerah tahun 2017-2022 ini adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana*”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah 6 buah misi pembangunan Kabupaten Buleleng. Dari keenam misi tersebut, Dinas Kominfosanti memiliki peran untuk menyukseskan misi 3 yaitu: *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas*, dengan tujuan : *Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas*, dan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah: *Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah*. Indikator dari sasaran yang ingin dicapai ini adalah 1) *Nilai AKIP Daerah* dan 2) *Prosentase SKPD dengan nilai IKM Baik*.

##### 2. Tujuan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah “Meningkatnya pembangunan Buleleng di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik”.

##### 3. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan e-government di Pemkab Buleleng
- b. Meningkatkan pelayanan informasi publik
- c. Meningkatkan pengamanan data dan informasi

Rincian perencanaan sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
		Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya pengamanan data dan informasi sesuai standar	Persentase keamanan data dan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



#### 4. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah:

- 1) Pengembangan dan pemberdayaan jaringan online Pemkab. Buleleng
- 2) Penyusunan kajian terkait pengembangan TIK
- 3) Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK
- 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik
- 5) Penyebarluasan informasi yang benar tentang isu dan tema yang berkembang
- 6) Peliputan dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah, dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang ada
- 7) Meningkatnya pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng yang berkualitas
- 8) Pengamanan komunikasi terhadap orang-orang penting jajaran pemerintah daerah, tempat-tempat penting dan strategis, serta kegiatan-kegiatan penting yang diselenggarakan
- 9) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dinas sesuai dengan tatausaha keuangan yang benar dan perencanaan yang telah ditetapkan.

#### 5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai misi tersebut adalah:

- 1) Mengembangkan dan memelihara jaringan online Pemkab Buleleng
- 2) Mengelola server dan kelengkapannya
- 3) Penyediaan layanan internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat
- 4) Pengumpulan dan pengolahan data
- 5) Menyusun kajian-kajian dalam rangka pengembangan TIK di Pemkab. Buleleng
- 6) Melakukan pengembangan dan pengelolaan fasilitas pengembangan SDM bidang TIK
- 7) Melakukan pelatihan SDM di bidang TIK
- 8) Mengelola dan mengembangkan layanan pengadaan secara elektronik
- 9) Membangun, mengembangkan dan memonitor aplikasi layanan Pemkab Buleleng
- 10) Pengembangan dan pengelolaan nama domain dan subdomain
- 11) Pengembangan dan pengelolaan situs resmi Pemkab Buleleng

- 12) Penyusunan regulasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penerapan e-government
- 13) Peningkatan kapasitas tenaga teknis Dinas Kominfosanti terkait penerapan e-government
- 14) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data opini publik yang muncul pada media cetak, elektronik dan online (sosial media)
- 15) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data tema komunikasi publik yang sedang berkembang di masyarakat
- 16) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling dan pelayanan multimedia
- 17) Melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pembangunan daerah
- 18) Menyebarluaskan perss release kepada awak media
- 19) Menyebarluaskan informasi melalui Pameran Pembangunan
- 20) Menyebarluaskan informasi melalui penerbitan majalah dan brosur/pamflet
- 21) Menyebarluaskan informasi melalui media tradisional
- 22) Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)
- 23) Mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat
- 24) Meningkatkan koordinasi PPID Pemkab Buleleng
- 25) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral
- 26) Melaksanakan pengamanan persandian terhadap orang (vvip), tempat strategis, dan kegiatan stategis yang dilaksanakan/terkait dengan Pemkab Buleleng
- 27) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan persandian yang dilakukan
- 28) Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengaman persandian yang dimiliki
- 29) Menyusun regulasi/ kebijakan terkait pengamanan komunikasi dan informasi di lingkup Pemkab Buleleng
- 30) Mengembangkan sumber daya manusia di bidang persandian
- 31) Melakukan penataan arsip dan data keuangan dan kepegawaian
- 32) Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku
- 33) Memenuhi segala kewajiban kantor tepat waktu
- 34) Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai
- 35) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang siap pakai



- 36) Memenuhi kebutuhan akan gedung kantor dan perlengkapan kantor lainnya dengan baik
- 37) Memenuhi kebutuhan kendaraan dinas operasional dengan baik dan siap pakai
- 38) Memenuhi kewajiban dinas untuk kegiatan rohani dan Hari Besar Nasional
- 39) Penyediaan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu bagi pegawai
- 40) Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan rohani pegawai
- 41) Memfasilitasi aparatur untuk meningkatkan kemampuannya dibidang perencanaan, keuangan, dan kepegawaian
- 42) Memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk memonitor pelaksanaan program kegiatan
- 43) Menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan penganggaran yang benar

#### 6. Program Pencapaian Sasaran

Program yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- d. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
- e. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
- f. Program Pengelolaan Layanan e-Government
- g. Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah
- h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

#### **B. Penetapan Kinerja**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 4. Program Pengelolaan Layanan e-Government	5.468.685.000 231.050.000 21.000.000 173.734.000
2.	Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	100%	1. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 2. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	568.510.000 229.381.000
3.	Meningkatnya pengamanan data dan informasi sesuai standar	Persentase keamanan data dan informasi	100%	1. Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	20.130.000 275.065.000



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2020, berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan

Pemerintahan yang berbasis elektronik, atau lebih dikenal dengan e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk itu pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mulai tahun 2019 melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diharapkan dapat menjadi pemicu daerah-daerah untuk menerapkan e-government dengan baik.

Capaian kinerja sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2020 terhadap (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,99	3,00	3,70	123,33	3,20	115,62

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

a. *Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020*

Berdasarkan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dari proses penilaian yang dilakukan selama tahun 2019, baru pada tahun 2020 diberikan hasil penilaian SPBE untuk kabupaten Buleleng yaitu: SANGAT BAIK, dengan nilai 3,7. Sehingga dengan demikian realisasi pencapaian targetnya adalah 123,33% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

*b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka penilaian SPBE baru dilakukan pada tahun 2018. Penilaian yang dilakukan tersebut untuk mengukur pelaksanaan SPBE sampai dengan tahun 2017. Dan hasilnya baru diberikan pada tahun 2019. Sedangkan pengukuran SPBE yang dilakukan pada tahun 2019, hasilnya baru akan diberikan pada tahun 2020. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai dari tahun sebelumnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 1. Grafik capaian realisasi Sasaran 1 dari tahun ke tahun

*c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra*

Jika dilihat realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra, maka pencapaian kinerja tahun 2020 ini telah melebihi dari target akhir renstra, yaitu 3.20. Hal ini tentu saja sangat membahagiakan karena usaha yang dilakukan untuk meningkatkan nilai dari penerapan SPBE di Pemkab Buleleng ini diapresiasi dengan sangat baik oleh kementerian PAN RB RI.

*d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam penerapan SPBE di Kabupaten



Buleleng. Salah satu point penting yang menjadi kekuatan bagi Kabupaten Buleleng dalam menerapkan SPBE ini adalah Strategi dan Perencanaan, dimana dari Master Plan e-Government Kabupaten Buleleng 2014-2019, telah dibentuk Tim Pengarah Penerapan e-Government yang mengacu pada Master plan tersebut. Sehingga arah langkah penerapan e-Government di Kabupaten Buleleng telah cukup terstruktur.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini. Permasalahan yang terjadi dan solusi yang dapat dilakukan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM aparatur dibidang TIK di seluruh SKPD yang cukup menghambat percepatan penerapan implementasi e-Government di Pemkab Buleleng. Sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan di bidang TIK untuk SDM aparatur yang masih belum memiliki kemampuan dibidang TIK.
- 2) Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangatlah cepat, yang dapat menyebabkan perangkat maupun sistem yang digunakan dalam e-Government tidak berfungsi secara optimal. Sehingga dibutuhkan pembaharuan/ update teknologi yang memungkinkan seluruh komponen dalam e-Government dapat berdaya guna dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Master plan e-government yang sebelumnya disusun bersama dengan BPPT telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2019. Namun sehubungan dengan kondisi keuangan daerah dan terjadinya pandemi Covid-19, dimana terjadi pengalihan fokus kegiatan, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu di tahun 2021 penyusunan master plan ini diusahakan untuk dapat dilaksanakan. Sehingga perencanaan penerapan SPBE dapat disusun dengan baik dan berkelanjutan.

*e. Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan sasaran 1 ini sebesar 87,67%. Hal ini disebabkan karena anggaran pada kegiatan penyediaan layanan internet bagi masyarakat melalui free wifi di seluruh desa pakaraman, puskesmas dan tempat wisata belum sepenuhnya dapat terserap. Penyerapan anggaran ini sangat tergantung pada kemampuan pihak ketiga untuk mengaktifkan free wifi pada titik-titik yang ditentukan. Sehingga realisasi anggarannya tidak sama di setiap titik layanan. Selain dari itu kurangnya realisasi keuangan ini lebih

dikarenakan efisiensi pada anggaran Makan-minum rapat/sosialisasi, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak (BBM), foto copy, dan beberapa belanja lainnya.

*f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Untuk dapat mencapai Sasaran 1 ini, maka terdapat 4 Program dan 8 Kegiatan yang mendukung. Program-program tersebut adalah

- 1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
  - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
  - Penyediaan layanan akses internet
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan yaitu: Pengkajian dan Integrasi Sistem Informasi
- 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan yaitu: Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- 4) Program Program Pengelolaan Layanan e-Government dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain
  - Pembinaan dan Pengembangan Situs Resmi Pemerintah Daerah
  - Pengkajian dan Pengembangan Implementasi e-Government

2. Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar

Sesuai dengan amanat Undang undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, maka pemerintah daerah sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali terhadap informasi-informasi yang dikecualikan. Sehingga salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, untuk memperoleh informasi dapat dipenuhi dengan baik.

Masyarakat yang tidak puas dengan layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, dapat melakukan gugatan informasi terhadap instansi pemerintah daerah yang tidak memenuhi kebutuhan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. Sehingga



diharapkan pemerintah daerah mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu informasi.

Pengukuran indikator sasaran ini dilakukan dengan membandingkan jumlah gugatan/ sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada perangkat daerah lingkup Pemkab Buleleng atau kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat ditangani dengan baik dibandingkan dengan jumlah gugatan/sengketa terajadi. Berdasarkan informasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali, maka selama tahun 2020 ini tidak ada gugatan/ sengketa informasi yang diajukan terhadap Pemerintah Kabupaten Buleleng ataupun Perangkat Daerah di lingkupnya. Sehingga pencapaiannya 100% atau seluruh gugatan/sengketa dapat diselesaikan dengan baik.

**Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2020 terhadap Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	100%	100%	100%	100	100%	100%

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

*a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020*

Berdasarkan informasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali, bahwa di tahun 2020, tidak ada gugatan/sengketa informasi yang diajukan kepada Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah lingkup Pemkab Buleleng. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabuapten Buleleng telah cukup baik untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi telah terpenuhi dengan baik.

*b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Provinsi Bali dari tahun ke tahun, Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun Perangkat Daerah di lingkupnya belum pernah digugat atau disengketakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Sehingga persentase pelayanan informasi informasi publik sesuai standar dapat tercapai 100% dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut



Gambar 2. Grafik capaian realisasi Sasaran 2 dari tahun ke tahun

Dari gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 (kondisi awal Renstra) sampai dengan tahun 2020 pelayanan informasi publik yang dilakukan Pemkab Buleleng telah sesuai standar, sehingga gugatan/sengketa informasi terhadap Pemkab Buleleng tidak pernah ada.

*c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra*

Berdasarkan hasil pencapaian target kinerja tahun 2020, jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra, maka capaian di tahun ini telah tercapai 100%. Hal ini yang harus terus dipertahankan capaiannya, sehingga peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat mutlak harus dilakukan, mengingat kebutuhan akan informasi masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.

*d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari usaha dan upaya pemerintah yang menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan



informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Termasuk website dan media sosial yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat, terutama khususnya anak muda. Namun tidak melupakan saluran-saluran komunikasi konvensional, seperti siaran keliling, majalah, radio, dan surat kabar lokal dan nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dan solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya informasi, sehingga Pemerintah Daerah harus siap dengan informasi-informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini.
- 2) Meningkatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini semakin memudahkan orang untuk menyebarluaskan informasi baik informasi yang benar maupun tidak benar (hoax) yang menyesatkan, untuk itu perlu dilakukan monitoring terhadap isu yang berkembang di masyarakat dan berbagai media online (internet). Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi yang benar atas isu yang beredar tersebut.

*e. Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai Sasaran 2 pada tahun 2020 sebesar 99,86%. Sejumlah anggaran tidak dapat direalisasikan sebagai wujud efisiensi pemanfaatan anggaran, yaitu pada belanja BBM, perjalanan dinas dan fotocopy.

*f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Untuk dapat mencapai Sasaran 2 ini, maka terdapat 2 Program dan 9 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah:

- 1) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
  - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi
  - Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa
  - Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik
- 2) Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan dan Pengolahan Data Opini Publik
- Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema
- Pelayanan Informasi Publik

3. Sasaran 3: Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini selain memberikan keuntungan namun juga dapat memberikan kerugian bagi umat manusia. Untuk itu, salah satu tugas pokok persandian adalah menjaga keamanan data dan informasi milik pemerintah daerah, baik itu komunikasi orang-orang penting Pemkab Buleleng, pengawasan pengamanan tempat-tempat strategis/penting milik Pemkab Buleleng, dan juga pengamanan data/ informasi milik Pemerintah Daerah.

Pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan ini dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara RI, sehingga secara periodik dilaporkan proses pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

Capaian kinerja sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2020 terhadap Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase keamanan komunikasi dan informasi	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

*a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020*

Pengukuran indikator ini berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengamanan data dan informasi (operasional persandian) di Kabupaten Buleleng, terhadap orang-orang penting di Pemkab Buleleng, tempat-tempat penting/strategis milik Pemkab Buleleng, dan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng. Dari hasil pelaksanaan tersebut, diketahui bahwa tidak didapatkan gangguan keamanan atas data dan informasi yang tidak dapat diatasi atau dihadapi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.



Dari target 100,00% persentase keamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng pada tahun ini, dapat direalisasikan sebesar 100% atau tercapai 100% dari target. Ketercapaian ini yang harus terus dipertahankan sehingga stabilitas keamanan khususnya di bidang data dan informasi milik Pemkab Buleleng dapat terjaga.

*b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian antara tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 3, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik capaian sasaran 3 dari tahun ke tahun

Dari gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 (kondisi awal Renstra) sampai dengan tahun 2020 pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan telah memberikan keamanan di bidang data dan informasi milik Pemkab Buleleng, sehingga gangguan terhadap data dan informasi dapat ditangani dengan baik, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemkab Buleleng maupun masyarakat.

*c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra*

Bila dibandingkan realisasi capaian tahun 2020 dengan target akhir Renstra, maka telah tercapai 100,00% dari target 100,00% atau mencapai 100,00%. Untuk itu harapan dapat menjaga keamanan data dan informasi milik Pemkab Buleleng di target akhir renstra dapat terwujud dengan baik dan segala bentuk gangguan terhadap data dan informasi ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya.

*d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai target seperti yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antar SKPD Lingkup Pemkab Buleleng dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, yang senantiasa mendukung segala proses pengamanan yang dilakukan, sehingga segala bentuk gangguan terhadap data dan informasi dapat di tangani dengan baik.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rentannya perangkat komunikasi radio, yang digunakan untuk menangani seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng, terhadap gangguan cuaca/ alam, yang dapat menyebabkan terputusnya komunikasi. Untuk itu dilakukan monitoring dan perawatan secara berkala terhadap perangkat-perangkat luar yang terpasang tersebut, sehingga keandalannya dapat dipertahankan.
- 2) Kesadaran akan keamanan data dan informasi di kalangan aparatur pemerintah masih sangat kurang, yang dapat menyebabkan mudahnya pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pencurian bahkan pengrusakan data dan informasi milik Pemerintah daerah. Untuk itu dilakukan sosialisasi kepada aparatur pemerintah tentang keamanan data dan informasi, agar dapat lebih berhati-hati dalam membuat, mengirim atau menyebarkan informasi penting milik Pemkab Buleleng.

*e. Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi kinerja pada Sasaran 3, dapat tercapai sebesar 100,00% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97,27%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Kurangnya realisasi keuangan dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi pada anggaran Makan-minum, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak (BBM), foto copy, dan beberapa belanja lainnya.



f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk dapat mencapai Sasaran 3 ini, maka terdapat 2 Program dan 4 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah:

- 1) Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah, dengan kegiatannya adalah Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Pengelolaan Sumber Daya Persandian
  - Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Persandian
  - Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi

## **B. Realisasi Anggaran**

Dari total keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2020 sebesar Rp.8.382.065.493,00 (*delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp. 7.512.875.337,00 (*tujuh milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) atau mencapai 89,63% (*delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga persen*). Sedangkan anggaran pada program-program bidang komunikasi, informatika dan persandian (sesuai dengan Perjanjian Kinerja/ Tabel 2.2 di atas) sebesar Rp.6.987.655.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.251.939.857,00 atau mencapai 89,47%.

Pada sasaran ke-1, Meningkatnya kualitas e-government di Pemkab Buleleng, dari anggaran Rp.5.894.469.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.167.916.722,00 atau tercapai 87,67%. Sedangkan pada sasaran ke-2, Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik, sebesar Rp. 797.991.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 796.890.346,00 atau tercapai 99,68%.

Untuk sasaran ke-3, Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng, dari anggaran Rp.295.195.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.287.132.789,00 atau tercapai 97,27%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas e-government di Pemkab Buleleng	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,70	123,33	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	5.468.685.000	4742292912	86,72%
						2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	231.050.000	231043438	99,99%
						3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	21.000.000	20.999.972	99,99%
						4. Program Pengelolaan Layanan e-Government	173.734.000	173.580.400	99,92%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00	1. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	568.610.000	568.272.006	99,94%
						2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	229.381.000	228.618.340	99,67%
3.	Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng	Persentase keamanan data dan informasi	100,00%	100,00%	100,00	1. Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah	20130000	20118000	99,94%
						2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	275.065.000	267.014.789	97,07%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, laporan ini menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan ini akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, Laporan ini memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 tahun 2016 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016.

Dari tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, satu indikator tercapai 123,33%, yaitu indikator Sasaran 1, sedangkan indikator Sasaran 2 dan 3 dapat tercapai 100%. Sedangkan dari sisi keuangan, realisasi anggaran guna pencapaian kinerja tersebut berhasil mencapai 89,47%. Sisa anggaran lebih dikarenakan efisiensi anggaran yang ada, sehingga terjadi sisa pada anggaran, penyediaan bandwidth internet, makan dan minum, foto copy, BBM, perjalanan dinas, dan beberapa mata anggaran lainnya.

Beberapa persoalan dan tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pada tahun mendatang antara lain:

1. Master plan e-government yang sebelumnya disusun bersama dengan BPPT telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2019. Namun sehubungan dengan kondisi keuangan daerah dan terjadinya pandemi Covid-19, dimana terjadi pengalihan fokus kegiatan, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu di tahun 2021 penyusunan master plan ini diusahakan untuk dapat dilaksanakan. Sehingga perencanaan penerapan SPBE dapat disusun dengan baik dan berkelanjutan
2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan orang untuk menyebarluaskan dan mendapatkan informasi sehingga monitoring atas isu/ informasi yang berkembang harus dilakukan, dan responsifitas Pemerintah daerah harus

ditingkatkan guna menangani informasi yang menyesatkan atau tidak benar (hoax) agar jangan sampai informasi tersebut menjadi pengganggu stabilitas keamanan daerah.

3. Masih adanya SKPD yang memiliki sistem informasi/aplikasi namun belum terintegrasi atau diterapkan dalam jaringan online system, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan dibuatnya regulasi yang mengatur pengadaan dan penerapan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Masih banyaknya aparatur pemerintah yang belum mampu memanfaatkan TIK dalam kegiatannya, sehingga pelatihan-pelatihan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
5. Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap keamanan data dan informasi milik Pemkab Buleleng ini juga harus menjadi perhatian, karena dari sinilah peluang atau kemungkinan kejahatan/ gangguan terhadap orang-orang penting, tempat-tempat strategis dan kegiatan-kegiatan penting Pemkab Buleleng dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik. Untuk itu perlu dilakukan pengamanan dan peningkatan kemampuan dibidang keamanan data dan informasi, agar dapat menghadapi ataupun mengatasi permasalahan keamanan yang tak tampak secara nyata ini.

Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.